

Tunggu Walikota Biaya Cek Kesehatan Calon KPPS

SALATIGA (KR)- Biaya cek kesehatan bagi 4.564 calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Salatiga masih menunggu keputusan Walikota Salatiga. Kepala Kesbangpol Salatiga yang juga Ketua Desk Pemilu 2024 Salatiga, Valentino T Haribowo kepada KR menjelaskan dari hasil pertemuan dengan beberapa pihak termasuk KPU Salatiga beberapa hari lalu memang telah disepakati bahwa biaya cek kesehatan (cek gula darah, kolesterol, asam urat) dan lainnya gratis.

"Kami pada pertemuan dengan beberapa pihak termasuk KPU Salatiga menyepakati bahwa biaya cek kesehatan bagi 4.564 calon KPPS di Salatiga gratis dan di biayai pemerintah daerah. Untuk dinas pengampu diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota (DKK)," tandas Valentino T Haribowo.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga, dr Prasit Al Hakim mengungkapkan pemahamannya adalah DKK/Puskesmas dalam cek kesehatan ini kerja bakti untuk kepentingan negara dan semoga Pemilu lancar. "Untuk biaya belum ada, yang pasti kami nanti kerja bakti untuk kepentingan negara begitu saja Mas," kata Prasit Al Hakim melalui telepon, Minggu (10/12).

Dari pantauan KR, beberapa pengurus RT dan RW sudah membahas dan mengusulkan para calon anggota KPPS di Salatiga yang bakal bekerja keras untuk melancarkan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Komisioner KPU Salatiga, Wahyu Budi Utomo, mengatakan bahwa masalah biaya gratis atau tidak belum ada kepastian dan masih menunggu note dari Pj Walikota Salatiga. "Belum ada kepastian biaya gratis, masih menunggu note dari Pj Walikota Salatiga," kata Wahyu Budi Utomo, Minggu (10/12).

"Untuk seluruh RT di RW 10 Perumahan Domas Salatiga telah mengusulkan calon anggota KPPS. Di Perumahan ini ada dua TPS, yakni TPS 43 dan TPS 44," kata seorang pengurus RW 10 Perumahan Domas Salatiga. **(Sus)-f**

Terminal Adipura Siap Sambut Pemudik

WONOGIRI (KR) - Jelang libur panjang akhir tahun Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri berbenah menyambut arus mudik Nataru (Natal dan Tahun Baru). Pembersihan nampak dengan kegiatan peningkatan sarpras pendukung terminal yang dilakukan Pemkab Wonogiri bersama jajaran pengelola terminal milik pemerintah pusat tersebut.

"Prinsip semua sarpras sudah kita siapkan dengan matang, dipastikan selama libur panjang Nataru akan terjadi peningkatan penumpang walau tidak seramai musim lebaran atau Idul Fitri," ungkap Koordinator Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri Agus Hasto Purwanto SSoS MSI saat ditanya wartawan di kantornya, Senin (11/12) siang.

Diikuti Agus, Wonogiri disebut menjadi salah satu tujuan pemudik Nataru lantaran daerahnya dikenal sebagai gudangnya perantau atau kaum boro. Info yang kami terima, lanjut dia, program mudik gratis Nataru dari Kemenhub RI sebagian bakal turun di Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri. "Berapa angka pasti armada bus mudik gratis yang masuk terminal kami (Wonogiri) sampai saat ini masih menunggu petunjuk maupun jadwal dari pusat," ujar Agus. **(Dsh)-f**

TAX GATHERING DAN LAUNCHING BILLING CENTRE Digelar di Grand Artos Hotel & Convention

MAGELANG (KR) - Tax Gathering dan launching Billing Center Kabupaten Magelang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang di Semanggi Ballroom Grand Artos Hotel & Convention Magelang, Senin (11/12) malam. Ini diantaranya untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak atas kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah dan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Magelang melalui pajak daerah.

Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada para wajib pajak sebagai 'pahlawan pembangunan' di Kabupaten Magelang. "Ketika kita harus mengambil pajak dari bapak ibu sekalian, insya Allah akan kita tasyarufkan untuk kepentingan yang lebih besar, dan akan kita maksimalkan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Magelang," kata Bupati Magelang.

Salah satu contohnya, kata Bupati Magelang, melalui pajak daerah ini Pemerintah Kabupaten Magelang telah membeli tanah dengan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk menanggulangi darurat sampah, dan mendirikan pengolahan sampah yang luar biasa, yang akan dikerjakan mulai akhir tahun ini sampai tahun 2024 nanti. Dikatakan, keberadaan sampah ini nanti akan diolah dengan baik dan akan diubah menjadi energi seperti yang sudah dikerjakan di daerah lain.

"Selain itu pajak daerah ini juga kita pergunakan untuk merampungkan pembangunan Gedung Sport Center di Stadion Gemilang yang akan rampung pada akhir tahun ini," tambah Bupati Magelang. Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Siti Zumaroh mengatakan tujuan kegiatan Tax Gathering Tahun 2023 ini untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak atas kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah dan membangun kebersamaan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Selain itu sebagai sarana bagi wajib pajak untuk berdiskusi, serta menyampaikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Magelang dan untuk mewujudkan transparansi, validitas serta akuntabilitas. **(Tha)-f**



Penyerahan penghargaan dilakukan Bupati Magelang.

RAIH PERINGKAT TIGA BESAR NASIONAL Purworejo Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

PURWOREJO (KR) - Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) RI. Penghargaan tersebut menegaskan bukti tingginya kerja kolaboratif pemerintah dalam upaya perlindungan HAM.

Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada Plt Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dalam Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng Jakarta. "Pemkab Purworejo selalu meraih penghargaan peduli HAM sejak tahun 2014, namun baru tahun ini dilakukan pemeringkatan dan

Purworejo dinobatkan meraih peringkat tiga nasional," ungkap Yuli Hastuti kepada KR usai menerima penghargaan, Selasa (12/12).

Tahun ini Pemkab Purworejo meraih peringkat tiga dengan raih nilai 92,8, Purworejo hanya kalah tipis dari peringkat kedua kabupaten Tapin Kalimantan Selatan dengan nilai 93,5. Sementara Peringkat pertama diraih Kota Mojokerto Jawa Timur dengan nilai 94,55. Peringkat keempat dan kelima diraih Kota Tasikmalaya Jawa Barat dengan nilai 92,5 dan Kota Jakarta Timur DKI Jakarta dengan nilai 92,15.

"Prestasi ini akan terus kita pertahankan, bukan hanya soal nantinya kita dapat penghargaan atau tidak,

tetapi HAM ini menjadi isu penting di Purworejo yang selalu kita kawal bersama demi kesejahteraan warga Purworejo," ujar Plt Bupati.

Penghargaan ini, lanjut Yuli Hastuti, menjadi istimewa dibanding tahun sebelumnya, selain karena masuk tiga besar, prestasi tersebut menjadi buah dari upaya maksimal pemerintah dalam menangani isu-isu HAM yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Dirinya berharap ke depan kerjasama pemenuhan hak-hak masyarakat dapat lebih ditingkatkan melalui berbagai program terlebih kepedulian HAM merupakan program skala prioritas pemerintah.

Kabag Hukum Setda Pugh Trihatmoko menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi dasar penilaian. Yakni Purworejo

selalu meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM tiga tahun terakhir sejak 2019. Purworejo juga dinilai konsisten melaporkan aksi HAM dengan capaian nilai lebih dari 80 pada tahun 2022.

Selain itu, penilaian penghargaan tersebut juga dili-

hat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, politik, serta ekonomi dan sosial budaya. "Tidak terdapatnya dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo juga menjadi salah satu yang dinilai," terang Pugh. **(*)-f**



Yuli Hastuti SH (tengah) usai menerima penghargaan Kabupaten Peduli HAM.

Puskopti Siap Beli Kedelai Petani Lokal

SALATIGA (KR) - Pusat Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Puskopti) Jateng siap membeli kedelai petani lokal di Indonesia. Pada tahap awal pembelian kedelai lokal ini Puskopti Jateng melakukan kerja sama membeli kedelai yang ditanam petani di Kabupaten Grobogan.

Kerja sama ini dituangkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Puskopti dan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Kantor Puskopti Salatiga, Senin (11/12).

Penandatanganan disaksikan antara lain Penjabat (Pj) Walikota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi, Ketua KTNA Jateng, Ahmad Sofyan dan para perwakilan petani dan perajin tahu di Jateng. Bersama itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Puskopti dan Bank Mandiri dan antara Puskopti dengan Hotel

laras Asri Salatiga.

Ketua Puskopti Jateng Sutrisno Supriantoro mengatakan, MoU dengan KTNA ini, menegaskan Kopti siap menyerap atau membeli kedelai yang ditanam petani di Jateng.

Di Kabupaten Grobogan, sejumlah petani menanam kedelai lokal yang di lahan kurang lebih 10 hektare dan Kopti siap menampung hasil panen kedelai petani tersebut. "Kebutuhan kedelai di Indonesia sekitar 90 persen impor. Puskopti Jateng mendorong petani kedelai lokal meningkat-

kan produksinya. Puskopti siap membeli kedelai lokal," kata Sutrisno Supriantoro.

Pembelian kedelai lokal ini, menurutnya untuk membudayakan masyarakat perajin tempe dan tahu berbahan kedelai lokal. Kualitas kedelai lokal lebih baik terutama bahan pembuatan tahu. "Kedelai lokal memiliki sari dan protein yang cocok untuk pembuatan tahu, rasanya juga lebih gurih," ungkapnya.

Dengan kerja sama ini, ia berharap menjadi percontohan untuk merangsang para petani di Indonesia menanam kedelai. Selain itu Puskopti Jateng menekankan agar KTNA memenuhi standar kualitas itu seperti kebersihan, kadar air, dan harga yang sesuai.

Beberapa daerah di Jateng penghasil kedelai lokal dan menjadi sentra ke-delai lokal, wilayah

Grobogan, Sragen, dan Pati. Realisasi pembelian kedelai lokal diperkirakan akan dilakukan Mei tahun 2024 saat musim panen kedelai.

Sementara itu, untuk MoU dengan Bank Mandiri, Sutrisno mengatakan bahwa perbankan siap membiayai revitalisasi pabrik-pabrik tahu di Jateng agar tidak kumuh, sehingga produksi tahu dan tempe lebih higienis.

Sedangkan kerjasama dengan Hotel Laras Asri Salatiga, bahwa produk tahu tempe dan varian lain dari para perajin yang tergabung dalam Kopti bisa dijual di hotel berbintang. Ketua KTNA Jateng Ahmad Sofyan menyambut baik kerjasama ini, karena program pemerintah pusat adalah percepatan produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. **(Sus)-f**

BERNYANYI BARENG MASYARAKAT

SBY Lantunkan Beberapa Lagu

MAGELANG (KR) - Melakukan kunjungan ke Magelang, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat bernyanyi bareng masyarakat di Dusun Manggoran, tepatnya di kompleks Perumahan Bumi Permata Manggoran, Desa Bondo-

woso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Senin (11/12) malam. Sebelumnya, SBY juga sempat mampir menikmati kuliner khas Magelang, Tahu Pojok, yang ada di wilayah Kota Magelang. Kedatangan SBY dan rombongan disambut de-

ngikuti dan ikut menyanyikan syair lagu yang sedang dilantunkan. Dalam kesempatan ini Andi Alfian Mallarangeng juga sempat melantunkan salah satunya lagu Didi Kempot, 'Tirtonadi'.

SBY mengatakan niatnya hadir malam itu adalah mengunjungi sahabatnya, Bonny dan keluarganya. Tidak mengira, ternyata banyak juga warga yang datang. Juga dikatakan, sebelumnya sempat melakukan kunjungan ke Tahu Pojok Magelang yang merupakan *klange-nannya*.

Setiap datang ke Magelang, selalu mencicipi tahu tersebut. SBY juga menyampaikan rasa senangnya bisa bertemu dengan masyarakat dalam acara di Perumahan Bumi Per-

matang Manggoran, Senin malam.

Magelang, kata SBY, berada di hatinya. Selama 4 tahun mengikuti pendidikan di Akademi Militer (Akmil). Salah satu putra, Agus Harimurti Yudhoyono 3 tahun mengikuti pendidikan di SMA Taruna Nusantara yang dilanjutkan pendidikan di Akmil. Selama mengemban tugas di dunia militer, pernah menjabat Komandan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta yang membawahi wilayah DI Yogyakarta dan eks Karesidenan Kedu. "Jadi rasanya berkunjung ke Magelang membangkitkan kenangan indah, kenangan manis yang kami alami sepanjang pengabdian kepada negara dan bangsa," katanya. **(Tha)-f**



Susilo Bambang Yudhoyono berada di Manggoran Mertoyudan Magelang.

Pemadanan NIK-NPWP Dukung Kebijakan Satu Data

PEMERINTAH telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yaitu PMK-112/PMK.03/2022. Latar belakang ditetapkannya kebijakan ini adalah merupakan amanat UU HPP yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Salah satu tujuannya adalah mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas Tunggal yang terstandarisasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Salah satu pokok perubahan pada kebijakan ini adalah Format NPWP untuk NPWP Orang Pribadi Penduduk. Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 sebagai

Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sebelum tanggal 14 Juli 2022, harus melakukan pemadanan

dengan Data Kependudukan dan melakukan klarifikasi apabila data belum valid. Data yang telah dirilis oleh Ditjen Pajak per 22 November 2023 pukul 09.00 WIB menyebutkan bahwa 81% wajib pajak telah melakukan pemadanan NIK-NPWP yaitu sejumlah 59,3 Juta, sedangkan 12,6 Juta perlu dilakukan pemadanan.

Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP sebelum kebijakan ini ditetapkan, dapat melakukan pemadanan NIK-NPWP melalui laman pajak.go.id. Pada saat melakukan pengecekan terhadap pemadanan NIK-NPWP, akan ditemukan 2 status NIK yaitu Valid : NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP dan Belum valid, yakni NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP (perlu dilakukan validasi data).

Terkait hal itu, cara melakukan

pemadanan NIK-NPWP dengan cara akses laman pajak.go.id lalu pilih Login, masukkan NPWP, masukkan Password, masukkan Kode Keamanan, tekan tombol Login, pilih tab 'profil', pilih 'data profil', isikan data sesuai dengan e KTP, tekan Validasi, apabila data yang diisikan sudah sesuai, maka akan muncul notifikasi 'data ditemukan', tekan OK untuk melanjutkan, dan lanjutkan dengan menekan 'Ubah Profil'. Apabila sudah berstatus valid berarti NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP.

Wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP saat dilakukan implementasi Nasional, akan berdampak pada layanan administrasi yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak. Layanan administrasi yang dimaksud terdiri atas layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintahan

selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak, dan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selain itu berdampak pula pada Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Layanan Transaksi yaitu Wajib Pajak Pemotongan/Pemungutan tidak dapat menerbitkan bukti potong/faktur terhadap lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP yang valid. Berdasarkan PMK -112/PMK.03/2022, wajib pajak orang pribadi penduduk harus melakukan pemadanan NIK-NPWP karena dapat berdampak pada penyelenggaraan layanan administrasi apabila tidak dilakukan. Pemadanan NIK-NPWP pun dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui laman pajak.go.id. Segera lakukan pemadanan NIK-NPWP untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. **(*)-f**

***) Dian Aprilianti**
Penyuluh Pajak Muda KPP
Pratama Pondok Gede.